



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES
ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025/2026**



TANGGAL : 24 November 2025

JURU BICARA :

Dr. AGUS WIJAYANTO, SH., M.Kn

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 7 Semarang 50241 - Telp. (024) 8416676; 8415500 Psw. 170



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 7 Telp. (024) 8415500 – Psw. 170, Fax. (024) 8416676

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah Yang Kami Hormati.

**Bapak Ketua, para Wakil Ketua, segenap Anggota DPRD
Provinsi Jawa yang kami Hormati.**

**Yang Kami muliakan segenap Anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Segenap rekan-rekan Jurnalis, dan Hadirin yang berbahagia,

Marilah pada kesempatan yang mulia ini, kita panjatkan puji Syukur kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga masih dipertemukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk menyampaikan Laporan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Pertama tahun Sidang 2025/2026.

Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Sidang Pertama, Tahun 2024/2025 didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa

- Tengah No. 45 tahun 2022, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
 11. Hasil Bamus DPRD Provinsi Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober 2025.
 12. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 05 dan 12 November 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mengunjungi Masyarakat/ konstituen di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah demi menjalankan salah satu fungsi lembaga legislatif yaitu pengawasan dengan memantau kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Wilayah Daerah Pemilihan.
2. Menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dengan menggelar forum bersama dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait dengan potensi, kesulitan di

daerah, sehingga tercipta keselarasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan roda Pemerintahan.

3. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi serta mensosialisasikan produk-produk kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.
4. Menyajikan informasi, aspirasi dan temuan-temuan lapangan yang berkembang di kegiatan Reses dalam Masa Persidangan I Tahun 2025/ 2026.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Reses dilaksanakan pada tanggal 13 - 20 Oktober 2025, bertempat di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

II. HASIL RESES

Saudara Gubernur, segenap Anggota Dewan yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia

Kegiatan Reses yang telah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja telah berlangsung dengan lancar, adapun hasil dari kunjungan ke lapangan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (konstituen) secara umum dapat dilaporkan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

Percepatan Pembangunan di Desa dapat berjalan dengan lebih ideal mesti didukung oleh Profesionalitas SDM aparatur

Pemerintahan Desa yang mumpuni. Karena sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan integritas aparatur Desa melalui pelatihan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan digitalisasi administrasi. Dengan peningkatan SDM dan kapasitas ini maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, transparan dan bahkan gratis.

Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memperoleh dokumen-dokumen kependudukan; seperti KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga serta Dokumen lainnya hendaknya terus dipermudah dengan menciptakan pelayanan dengan sistem jemput bola melalui pelayanan "Keliling" kepada masyarakat.

Masyarakat sering enggan mengurus surat-surat kependudukan karena dianggap berbelit, berproses lama, jauh dan harus mengeluarkan biaya sehingga membuatnya sering menunda/mengabaikan kepemilikan kependudukan yang bersifat mendasar dan sangat penting.

Terkait percepatan Pembangunan di Desa, maka peran-peran Lembaga masyarakat Desa seperti; BPD, RT/RW dan forum warga lainnya harus diberdayakan fungsi dan perannya. Lembaga-lembaga ini hendaknya berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat yang beragam dan sekaligus bisa menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Desa.

Demi percepatan Pembangunan di Desa, maka sangat dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan Desa serta sekaligus peningkatan kompetensi (SDM) aparat Desa demi mendukung percepatan perbaikan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas. Pelayanan kepada masyarakat Desa oleh aparat Pemerintah Desa harus terus ditingkatkan, dipermudah dan terbuka sehingga tidak boleh ada pungutan-pungutan liar untuk mengurus hajat hidup dan kepentingannya.

Perbaikan kualitas SDM itu hendaknya juga diimbangi dengan perbaikan infrastruktur Pemerintah Desa dan Balai Desa serta segala perlengkapan penunjangnya, sehingga perbaikan dan percepatan pelayanan pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan saling melengkapi..

B. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perekonomian

Tekad Pemerintah yang memprioritaskan pemberdayaan sektor Pertanian demi mengangkat kesejahteraan kaum Tani harus bersinergi pada tekad Pemerintah Daerah, utamanya mempermudah proses produksi pertanian serta menjamin harga-harga keekonomian hasil panen, khususnya saat panen raya. Penetapan harga Gabah secara ideal harus diamankan/ dibuktikan realisasinya sampai pada tingkat petani.

Upaya meningkatkan kesejahteraan kaum Tani harus dilakukan dari Hulu sampai Hilir yaitu dengan memberikan kemudahan berproduksi di bidang pertanian. Upaya ini mesti diikuti

dengan penyediaan bibit/ benih unggul yang terjaga kualitasnya serta menjamin para Petani leluasa mendapatkan Pupuk “bersubsidi” dengan tidak mentolerir terjadinya penimbunan dan kelangkaan.

kelangkaan Pupuk bersubsidi yang masih saja terjadi dan dikeluhkan para petani, terutama pada musim tanam sehingga secara otomatis menimbulkan lonjakan permintaan (pembelian) harus dihentikan dan kepada oknum-oknum yang bermain harus diberikan tindakan hukum yang tegas.

Kaum Tani juga perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh modal usaha (produksi) serta bantuan alat-alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dibutuhkan-- khususnya pada masa tanam dan panen untuk memudahkan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan.

Disamping itu, penting dijaga stabilitas harga – harga produk pertanian agar tetap “menguntungkan” secara ekonomi, terutama pada saat musim panen dan sesudahnya, agar tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak.

Kedepan, Pemerintah Provinsi dituntut mampu memunculkan peluang dan pilihan menarik, terutama pada generasi “Milenial” agar tertarik dan terjun di bidang pertanian secara profesional. Para generasi muda hendaknya diberi keyakinan dan bahkan

jaminan besar bahwa sektor Pertanian juga dapat menjamin masa depan hidupnya secara layak dan terhormat.

Untuk itu perlu didorong terjadinya modernisasi sektor pertanian yang dikelola secara kreatif, inovatif dan professional sehingga bidang ini menjadi lapangan kerja yang menarik ditekuni generasi muda karena menjanjikan peluang serta kesejahteraan yang terus berkembang sehingga pada saatnya mereka bisa tampil sebagai *entrepreneur/* wirausahawan di bidang ini.

Disamping itu, bidang Peternakan juga sangat membutuhkan pendampingan/ pelatihan dari Pemerintah Daerah, mengingat sektor ini juga banyak ditekuni oleh masyarakat Pedesaan. Karena dibutuhkan pendampingan dan bantuan modal serta jaringan pemasaran bagi kelompok-kelompok Ternak agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang demi meningkatkan taraf kesejahteraan para pelakunya.

Kegiatan usaha/ ekonomi yang juga sangat perlu mendapatkan perhatian serius adalah pemberdayaan sektor UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja secara massif dan secara riil turut menggerakkan aktifitas ekonomi masyarakat. Karena itu butuh pemihakan nyata dari Pemerintah Daerah mengingat banyak pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan/ suntikan modal baru, promosi serta pemasaran produk, penataan manajemen dan pengelolaan keuangan sehingga dibutuhkan pendampingan.

Pendampingan, pemihakan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah juga dibutuhkan untuk kegiatan dan produk-produk ekonomi kreatif lokal yang menjadi ciri kas kearifan Daerah (Kabupaten/ Kota) wajib terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki produk – produk unggulan ekonomi yang menjadi ciri kasnya.

Produk-produk ekonomi kreatif lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM masih terkendala oleh terbatasnya jaringan pemasaran keluar sehingga dibutuhkan kepedulian dan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk membantu dan mendukung secara penuh agar bisa melakukan penetrasi pasar secara lebih luas.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam hal ini dituntut memiliki strategi nyata untuk menyerap dan bahkan memborong produk ekonomi kreatif di masing-masing daerah seperti dengan menyerap pembeliannya dengan alokasi anggaran APBD demi menyelamatkan dunia industri ekonomi kreatif dan para pelakunya di masing-masing daerah.

Bergeraknya aktivitas ekonomi kreatif yang kini banyak yang melibatkan kaum milenial, kaum Perempuan dan komunitas-komunitas pecinta hoby tertentu yang diharapkan menjadi bentuk usaha baru yang memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan serta dapat membuka banyak lapangan kerja baru jika ditekuni dan

mendapatkan pendampingan/ pemihakan serius dari Pemerintah Daerah, terutama terkait pengembangan dan pemasarannya.

Selanjutnya, banyaknya Desa-Desa Wisata di berbagai Kabupaten/ Kota perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik. Potensi Desa Wisata yang bermunculan hendaknya digarap secara serius sehingga menjadi destinasi/ pilihan wisata baru yang memunculkan peluang ekonomi ditengah masyarakat.

C. Bidang Pembangunan

Dampak cuaca ekstrim yang terjadi cukup lama yang diikuti dengan berbagai bencana terutama Banjir di berbagai wilayah secara nyata telah menyebabkan banyak jalan-jalan utama yang berlubang dan rusak parah.

Kondisi demikian telah membuat kecelakaan berlalu lintas meningkat dan membuat mobilitas masyarakat menjadi tidak nyaman karena selalu terjadi kemacetan yang sangat parah, khususnya jalur pantura Semarang – Demak. Kondisi demikian mencapai puncaknya saat terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir dan kemacetan sangat parah selama sehari-hari, terutama jalur Kaligawe-Sayung menuju Demak.

Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pusat untuk mengatasi persoalan tersebut yang terus terulang dan sekaligus memperbaiki infrastuktur jalan yang rusak akibat

kejadian tersebut. Dengan kolaborasi ini diharapkan ada solusi dan perbaikan permanen bisa segera terealisasi.

Disamping itu ada beberapa prioritas usulan yang diharapkan segera mendapat penanganan dari Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Normalisasi Sungai, Drainase dan Pengerukan Waduk demi mengatasi Banjir dan Rob yang masih sering terjadi maka dibutuhkan Normalisasi Sungai-Sungai akibat pendangkalan, perbaikan Drainase serta Pengerukan Waduk yang berkelanjutan sehingga keluhan masyarakat bisa tertangani, terutama di jalur Pantura Jawa Tengah. Jika langkah ini bisa berhasil niscaya Banjir/ Rob yang selalu terjadi di musim hujan bisa teratasi.
2. Fokus pembangunan di Pedesaan hendaknya diprioritaskan pada perbaikan jalan, jembatan, pavingisasi, betonisasi dan Pengerasan/ Pengaspalan jalan, pembuatan saluran/ irigasi, bendungan, bronjong, jembatan antar Desa, pembangunan talud dan tanggul sungai, pengerukan sedimentasi sungai serta Sumur Pantek untuk pengairan sawah, juga pengadaan Air Bersih, khususnya di Pedesaan secara lebih merata demi memenuhi kebutuhan air bersih serta mengatasi bencana kekeringan.

Pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk menyambung akses antar wilayah, Desa dan Kampung,

melancarkan arus pergerakan masyarakat, menghidupkan kegiatan ekonomi serta demi mengantisipasi secara dini terjadinya bencana banjir / Rob, terutama Banjir di dataran rendah serta longsor didataran tinggi.

3. Pembangunan infrastruktur Pertanian harus dijamin dan diprioritaskan, mengingat mayoritas penduduk Jawa Tengah masih tergantung pada pola kehidupan agraris sebagai sumber ekonomi utama kehidupannya.

Karena itu pembangunan saluran irigasi, sumur-sumur pantek, waduk, embung, perbaikan jalan dan jembatan yang mempermudah akses para petani ke sawah/ perkebunan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, pembuatan bendungan air mesti terus ditingkatkan pemerataannya. Untuk daerah Pertanian yang mengandalkan sistem tadah hujan, mesti diperbanyak sumur-sumur pantek sehingga kaum Tani tetap bisa berproduksi/ menanam— terutama saat musim kemarau.

4. Pasar Tradisional di Pedesaan dan menjadi pusat perdagangan pelaku UMKM, terasa kurang terurus, kotor/ kumuh dan tidak nyaman untuk bertransaksi ekonomi. Fakta inilah yang membuat masyarakat sering mengeluhkan kondisinya, padahal masyarakat Desa masih berbelanja di Pasar Tradisional karena harganya relatif terjangkau, lebih murah dan bisa ditawar.

Untuk itu Pemerintah Daerah diminta lebih serius menata kembali (merevitalisasi) Pasar-Pasar Tradisional agar terlihat bersih, nyaman dan dekat dengan masyarakat sehingga transaksi ekonomi diantara warga masyarakat semakin meningkat.

5. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat sangat membutuhkan dukungan alat transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau. Keberadaan armada bus Trans Jateng sangat dinantikan perluasan rutenya ke seluruh wilayah Jawa Tengah karena terbukti sangat membantu masyarakat. Keberadaan bus Trans Jateng harus dijaga kenyamanannya, AC-nya mesti normal saat armada berjalan.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Peserta BPJS Kesehatan berstatus PBI (dibayar Pemerintah) yang dinonaktifkan membuat banyak masyarakat yang kebingungan. Karena itu dibutuhkan sosialisasi massif tentang cara mengaktifkannya kembali "kepesertaannya" karena hal ini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat tidak mampu.
2. Insentif/ honor tenaga kependidikan keagamaan (non formal) hendaknya ditingkatkan, baik jumlah penerima dan nominalnya. Kepedulian Pemprov Jateng yang telah memberi insentif kepada para Guru TPQ, Madin/ Pesantren dan Sekolah Minggu patut diapresiasi, namun perlu dipikirkan untuk terus meningkatkan

jumlah nominalnya yang kini masih minim yaitu Rp. 100. 000,- perbulan.

3. Pemberian Bantuan/ Hibah kepada Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan dibawah Yayasan/ Lembaga hendaknya “dipermudah” mengingat keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat- utamanya demi menjaga moral masyarakat serta ikut berperan mencerdaskan generasi bangsa.
4. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat tidak mampu (Miskin) hendaknya didasarkan dengan data yang terkini yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Perumahan (Simperum) agar sesuai dengan kenyataan mengingat data yang digunakan untuk menentukan RTLH masih yang lama, padahal pihak Desa/ Kelurahan sudah sering mengajukan *update* data. Bantuan RTLH ini sangat dinanti masyarakat bawah diberbagai daerah agar lebih merata lagi. Rumah rusak parah akibat musibah banjir dan tanah longsor diharapkan juga bisa diajukan/ mendapat program RTLH.
5. Pendataan Masyarakat tidak mampu dan berkebutuhan khusus (disabilitas) harus terus menerus dilakukan secara akurat demi memastikan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah tidak menjadi salah sasaran. Upaya memperbaharui data ini harus terus menerus dilakukan Pemerintah sampai dilevel bawah (Kelurahan/ RW/RT) agar pemberian bantuan sosial lebih tepat sasaran.

6. Banyaknya jenis Kesenian yang, tumbuh dan berkembang di masing-masing Daerah telah menjadi ciri khas kearifan lokal hendaknya terus dijaga serta difasilitasi kelestarian, pengembangan dan aktualisasinya. Karena itu sangat dibutuhkan kepedulian dan dukungan Pemerintah Provinsi untuk memberikan pembinaan/ bantuan bagi pengembangan aktifitas berkesenian di daerah.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Reses sangat penting digelar secara periodik karena dapat dijadikan sarana silaturahmi dan komunikasi ideal, dengan mempertemukan anggota Dewan dengan masyarakat (konstituen) secara langsung demi menjaring aspirasi sehingga diharapkan dapat memberikan masukan, ide, kritik konstruktif dan saran kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka berperan aktif membangun Provinsi Jawa Tengah.

Dengan kegiatan Reses dapat muncul korelasi dan sinergi antara aspirasi nyata yang murni berkembang ditengah masyarakat dengan program-program pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sehingga lahir sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan prioritas pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berbagai aspirasi dan hasil Reses tersebut perlu mendapatkan perhatian serius serta dijadikan sebagai bahan rujukan serta

pertimbangan untuk menyusun program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimasa datang.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah masa Persidangan Pertama tahun 2025/2026. Harapan kami, segala aspirasi yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti dengan menganggarkan dalam APBD atau langsung melakukan peninjauan langsung kelapangan.

Akhirnya, kami mohon maaf jika dalam penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah, masa Persidangan Pertama Tahun 2025/ 2026 ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. *Terima Kasih.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 24 November 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Hj. KARTINA SUKAWATI, S.E., M.M., M.H. ARDHIE KURNIAWAN, A.Md